

REFORMASI ADMINISTRASI NEGARA



Reformasi Administrasi Negara

Penulis :

NI MADE MUSIYANI ANJASMARI

Perancang Sampul : AHMAD SYAFI'IE

Lay out : AHMAD SYAFI'IE

Diterbitkan Oleh :

CV. HEMAT Publishing

Amuntai Kalimantan Selatan

Dicetak oleh :

Percetakan HEMAT

Jl. Pembalah Batung Paliwara Amuntai Hulu Sungai Utara

Kalimantan Selatan

HP. 0821 5899 6559 HP. 0812 5688 1329

Email : cv.hemat239@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga Penulis bisa menyelesaikan buku ini dan ada di hadapan pembaca sekalian. Salawat dan salam marilah dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para zuriyat, sahabat, dan pengikut Beliau hingga akhir zaman. Inilah wujud dari pengabdian Penulis sebagai akademisi, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada para pembaca, dan buku ini disusun sebagai satuan acara perkuliahan Penulis sendiri saat mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Bab I membahas tentang Pengertian Reformasi dan Pengertian Administrasi Publik. Bab II berisikan tentang Paradigma dan Patologi, Bab III Menguraika sejarah reformasi dan Masalah Administrasi Publik di Indonesia.

Inilah sebagian yang bisa Penulis berikan untuk dunia pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Tentunya buku ini jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangatlah Penulis harapkan demi kesempurnaan buku ini. Semoga kita mendapatkan manfaat dan kebaikan dari hal-hal tersebut. Amin, Allahumma Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Amuntai, 31 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Reformasi.....	1
B. Pengertian Administrasi Publik.....	5
BAB II PARADIGMA DAN PATOLOGI.....	23
A. Paradigma Administrasi Publik (PAP).....	23
B. Patologi Administrasi Birokrasi Publik.....	33
a. Dimensi Pelayanan Publik.....	38
BAB III HISTORI DAN PROBLEMATIKA.....	42
A. Sejarah Reformasi	42
a. Era Orde Baru.....	50
b. Era Reformasi.....	54
B. Masalah Administrasi Publik di Indonesia.....	68
a. Contoh Kasus Pelayanan Publik.....	70
b. Urgensi Repormasi Birokrasi.....	76
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Reformasi

Reformasi merupakan upaya dari pemerintah maupun individu untuk melakukan perubahan terhadap suatu badan atau lembaga yang berada di suatu lingkungan, dengan melihat fenomena yang telah terjadi sebelumnya, dan dirasakan tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan anggota melalui sistem pemerintahan maupun pengorganisasian yang baik. Reformasi bisa dilakukan di semua aspek kehidupan, tanpa terkecuali di bidang agama, berdasarkan pada dinamika-dinamika kehidupan yang keliru yang diterapkan selama ini, sehingga membutuhkan perbaikan dan pelurusan tujuan melalui visi dan misi yang jelas.

Menurut McGrath, para mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya, secara umum mendekati Reformasi dengan pola pikir yang hampir sama, mereka bagaikan pelancong-pelancong pada Abad Pertengahan yang mendekati hutan lebat yang gelap di

bagian selatan Jerman. Mereka bagaikan penjelajah yang berpetualang masuk ke daerah yang baru, tidak pasti apa yang akan mereka temukan. Bahkan lebih dalam, McGrath mengatakan bahwa para mahasiswa kadang-kadang tergoda untuk mengabaikan ide-ide dan paham-paham dari Reformasi supaya mereka dapat memusatkan perhatian pada aspek-aspek sosial dan politik, sehingga konsekuensinya mereka akan gagal menangkap esensi dari Reformasi sebagai suatu fenomena sejarah dan gagal memahami mengapa Reformasi merupakan titik rujukan bagi banyak perdebatan di dalam dunia keagamaan masa kini dan di bidang lain.

Dari pandangan di atas dapat kita cermati, bahwa seharusnya reformasi itu dilakukan dengan menyeluruh tanpa pandang bulu dan tempat. Siapa saja bisa menjadi pelaku dalam menjalankan reformasi yang adil dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, sebagai landasan dalam menjalankan gerakan perubahan pada setiap bangsa yang memiliki jiwa besar.

Barnard T. Adney-Risakota, Ph.D, seorang warga Negara Amerika Serikat menyatakan pendapatnya dalam sebuah artikel yang menyatakan pandangan terbalik antara Reformasi di Amerika dan upaya Reformasi Di Indonesia;

“Kalau setiap orang punya kebaikan dan kejahatan, setiap sistem juga punya unsur yang baik dan jelek. Dalam politik yang nyata, tujuan realistis adalah mengurangi yang jelek dan menguatkan yang baik. Orde Baru bukan neraka yang bisa ditukar dengan surga. Saya agak malu dengan orang yang menjelekkkan Indonesia terus dan memuji-muji negara asal saya, Amerika Serikat yang seperti surga demokrasi. Menurut pendapat saya, ada banyak unsur dalam budaya sosial politik Indonesia yang jauh lebih baik dibandingkan dengan AS. Kelebihan dan kekurangan di Indonesia berbeda dengan kelebihan dan kekurangan di negara Barat. Kalau sekarang dalam masa susah kekurangan Indonesia lebih menonjol, tidak berarti jati diri atau nilai sosial budaya politik lebih rendah daripada negara yang disebut ‘maju’. Besok, kejahatan Barat yang akan menonjol dan kejahatan Indonesia disembunyikan. Masa reformasi adalah kesempatan luar biasa untuk meninjau kembali kekurangan sosio-politik di Indonesia dan memperbaikinya. Tetapi

jangan meremehkan harga diri Indonesia atau ‘throw out the baby with the bathwater’. Kesusahan sekarang ini bisa menjadi anugerah Tuhan”.

a. Pengertian Reformasi Menurut Para Ahli

1. Pengertian Reformasi Menurut Sedarmayanti

Pengertian reformasi adalah proses sistematis, terpadu dan komprehensif yang ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan untuk lebih lagi (Good Governance).

2. Pengertian Reformasi Menurut Quah

Pengertian reformasi adalah proses untuk mengubah prosedur birokrasi publik dan sikap tingkah laku birokrat dalam rangka mencapai efektivitas birokrasi serta tujuan pembangunan nasional.

3. Pengertian Reformasi Menurut Sinambela, dkk.

Pengertian reformasi adalah secara teoretis merupakan suatu perubahan yang mana secara ke dalaman relatif terbatas tetapi keleluasaan dalam perubahannya melibatkan seluruh elemen masyarakat.

4. Pengertian Reformasi Menurut Khan

Pengertian reformasi adalah perubahan pokok dalam sistem birokrasi yang mempunyai tujuan untuk mengubah struktur, tingkah laku, keberadaan dan kebiasaan lama.

5. Pengertian Reformasi Menurut Samonte

Pengertian reformasi adalah perubahan dengan menggunakan perencanaan dan adopsi dalam rangka membuat sistem administrasi sebagai badan yang lebih efektif dalam hal perubahan sosial, sebagai instrumen yang baik untuk membawa persamaan politik, sosial dan perubahan ekonomi.

6. Pengertian Reformasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Pengertian reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik atau agama dalam suatu masyarakat atau negara.

B. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik ialah salah satu dari ilmu sosial yang mengkaji sistem pengelolaan negara yang mengaitkan dengan kebijakan, organisasi, manajemen, dan pelayanan. Administrasi publik selalu

berhubungan dengan Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif. Selain itu, administrasi publik erat kaitannya dengan berbagai peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan publik, tujuan negara, administrasi pembangunan, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara dengan baik.

Jika ditinjau secara tata bahasa, administrasi publik mempunyai dua kata penyusun, yaitu administrasi dan publik. Dengan demikian, administrasi bisa diartikan sebagai suatu kegiatan atau kerja sama sekelompok orang yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan kata publik diartikan sebagai negara dan warga negara atau masyarakat.

Dengan begitu, administrasi publik bisa kita artikan sebagai sebuah proses menjalankan keputusan atau kebijakan untuk kepentingan negara, warga negara, atau masyarakat. Perlu kita ketahui bersama bahwa administrasi publik seperti halnya dengan administrasi lainnya yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan umum.

Marx mendefinisikan administrasi sebagai administrasi ditentukan dengan tindakan yang diambil dalam mencapai tujuan yang telah disadari. Ini merupakan penataan urusan yang sistematis dan penggunaan sumber daya yang diperhitungkan dengan tujuan untuk mewujudkannya yang diinginkan oleh seseorang/organisasi.

Pendapat selanjutnya datang dari Frederic Lane yang mengartikan administrasi sebagai *pengorganisasian dan pemeliharaan sumber daya manusia serta fiskal untuk mencapai tujuan suatu kelompok*. Definisi yang lengkap untuk administrasi publik bagaimana pun susah untuk dicapai karena banyaknya tugas yang termasuk dalam administrasi publik ini.

Sementara itu, menurut L D White, administrasi publik terdiri atas *semua operasi yang bertujuan guna memenuhi atau menegakkan kebijakan publik*. Di sisi lain, menurut Woodrow Wilson, administrasi publik merupakan penerapan hukum secara terperinci dan sistematis. Bisa juga dikatakan bahwa administrasi publik tidak lain merupakan kebijakan, praktik, aturan dan regulasi, serta lain sebagainya.

Saat ini, apakah administrasi publik dapat dipisahkan dari sistem sosial dan politik? Jawabannya, tentu tidak dan oleh karena itu muncul definisi lain yang diberikan oleh FA Nigro, yang berpendapat bahwa administrasi publik pada intinya merupakan upaya kelompok kooperatif dalam suatu pengaturan publik.

Kedua, ini mencakup ketiga cabang pada tiga pokok pemerintah, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa karena administrasi publik memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan, oleh karena itu menjadi bagian dari proses politik juga, contohnya Rancangan Undang-Undang dan Undang-Undang. Selain itu, Nigro juga mengungkapkan bahwa administrasi publik berbeda dengan administrasi swasta dalam banyak hal. Lebih lanjut, administrasi publik berinteraksi dengan berbagai kelompok swasta dan individu dalam memberikan layanan ke masyarakat.

- a. Adapun definisi administrasi publik menurut para ahli, antara lain:

1. **Leonard D. White**, Administrasi Publik ialah semua kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan dengan mendasarkan kepada kebijakan negara.
2. **E.H. Litcfiled**, Administrasi negara adalah bagian daripada suatu studi tentang bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, dilengkapi tenaga, tenaganya dibiayai, digerakkan dan dipimpin.
3. **Chandler dan Plano (1988)**, Administrasi publik adalah suatu proses dimana sumberdaya dan personel publik di organisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan dan kebijakan publik. Mereka juga menjelaskan bahwa administrasi publik ialah seni dan ilmu (*art and science*) yang bertujuan untuk mengatur kebijakan publik untuk memecahkan permasalahan publik yang terjadi dalam suatu organisasi atau yang lainnya.
4. **Mc Curdy (1986)**, Pengertian administrasi publik ialah salah satu metode pemerintah suatu negara dan bisa dilihat sebagai

suatu proses politik serta bisa juga dianggap sebagai cara prinsipil untuk melaksanakan berbagai fungsi negara. Artinya, administrasi negara bukan hanya mengurus soal administratif negara tapi juga persoalan politik. Orang biasa menyebutnya dengan istilah “ Birokrasi “.

5. **Fesler (1980)**, Arti administrasi publik adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam skala besar untuk kepentingan publik. Dalam hal ini, pemegang kekuasaan memiliki wewenang atau tanggung jawab yang besar dalam setiap pengambilan kebijakan guna memenuhi kebutuhan publik. Pemegang kekuasaan diharapkan bisa lebih responsif dalam mengambil kebijakan publik.

b. Sifat dan Ruang Lingkup Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan aspek terpenting dari birokrasi di seluruh dunia; baik itu negara dengan karakteristik demokrasi, sosialis, atau bahkan kapitalis. Apalagi, dalam

negara sosialis, karena semua aspek kehidupan warga dipengaruhi dan ditentukan oleh pemerintah, peran pemerintah amat sangat kuat.

Namun, ada perubahan besar dalam cara administrasi publik diimplementasikan dari zaman kuno dan abad pertengahan saat inisiatif tidak lebih dari fungsi administratif sporadis seperti menjaga hukum dan ketertiban serta mengumpulkan pendapatan dengan sedikit atau tanpa aktivitas untuk mencapai kesejahteraan.

Orang-orang yang melakukan kegiatan administrasi publik ini dipilih oleh raja-raja dan tidak lebih baik dari pelayan pribadi mereka saja. Seiring dengan perkembangan zaman, tujuan administrasi publik juga berubah dan di abad kesembilan belas; pendekatan terorganisir untuk melayani sipil dan administrasi publik diadopsi.

Pendekatan ini didasarkan pada kerangka hukum yang lengkap menggantikan fungsi patriarki dan turun-temurun dengan birokrasi yang telah mengakar dengan kuat. Adanya

pendekatan baru bagi administrasi publik terjadi disebabkan sejumlah alasan. Salah satu alasan utama dan terpenting yaitu revolusi industri.

Dengan adanya revolusi industri, pemerintah di suatu negara memasuki perdagangan, yang kemudian diikuti oleh paham isme-isme, yaitu imperialisme, nasionalisme, dan internasionalisme yang menambah perluasan tugas dan tanggung jawab suatu pemerintahan. Di zaman sekarang ini, sekali lagi jauh berbeda dengan yang terjadi seabad yang lalu. Selain itu, ruang lingkup administrasi publik juga telah mengalami pergeseran, termasuk susah untuk memutuskan apakah itu paradigma atau bukan.

Akan tetapi, seiring dengan meningkatnya kesadaran di kalangan masyarakat terutama di negara yang berkembang dan memperoleh ilmu pengetahuan tentang hak, hak istimewa, dan hukum di antara orang-orang di negara maju (misalnya saja perdebatan tentang Undang-Undang Rekonsiliasi Perawatan Kesehatan dan Pendidikan tahun 2010) telah

memunculkan tantangan baru bagi para administrator publik dan pembuat/pemangku kebijakan dalam suatu pemerintahan.

Permintaan untuk layanan nasional yang bersatu, konflik kepentingan antara berbagai bagian ekonomi dalam suatu masyarakat dan dengan migrasi global serta kemudian globalisasi; perlindungan kepentingan kelompok multi-etnis masyarakat telah menyebabkan administrator publik sibuk.

Administrasi ini sangat penting karena tidak cukup untuk membuat kebijakan dan undang-undang di atas kertas putih saja. Penafsiran, penerjemahan kebijakan, dan undang-undang tersebut menjadi tindakan dan pelaksanaannya merupakan bagian yang tidak mudah. Oleh karena itu, penyelenggara publik wajib memainkan peran penting dalam menjalankan pemerintahan sebagai mesin yang berjalan. Adanya birokrasi mungkin sering diejek oleh kalangan masyarakat, akan tetapi apabila pekerjaan administratif dihentikan, tidak ada yang benar-benar terjadi

Di hampir seluruh negara di dunia, jumlah orang yang dipekerjakan dalam pekerjaan administrasi publik tergolong sangat banyak, contohnya negara adidaya Amerika Serikat, angkanya kira-kira mencapai 2.036.000 warga sipil, tidak termasuk pegawai Kongres dan pengadilan Federal. Selain di Amerika Serikat, di Inggris angkanya mencapai beberapa ribu dan di India juga ada ujian untuk menjadi pegawai negeri. Dari berbagai peran penting yang dimainkan administrasi negara, yang paling penting yaitu melaksanakan hukum dan kebijakan dengan baik, optimal, dan patuh, serta bertindak sebagai *adjudicator*.

c. Ada beberapa fungsi administrasi publik, di antaranya:

1. Fungsi Tradisional

Fungsi tradisional adalah fungsi yang utama dalam suatu administrasi publik. Fungsi ini mencakup kesejahteraan umum, perpajakan, hubungan luar negeri, ketertiban dalam negeri, pertahanan dan keamanan, pekerjaan umum, dan lain sebagainya.

2. Fungsi Pembangunan Bangsa

Fungsi kedua, yaitu pembangunan bangsa yang bertujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia di tengah masyarakat Indonesia yang sangat heterogen dan globalisasi yang tak terbendung.

3. Fungsi Manajemen Ekonomi

Fungsi yang lainnya, administrasi publik sebagai pembuat regulasi untuk manajemen ekonomi.

4. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi keempat yaitu fungsi kesejahteraan sosial yang langsung berhubungan dengan sistem pelayanan kesejahteraan bagi warga negara. Pemerintah wajib ikut campur tangan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara memberikan pelayanan kepada warga negara atau masyarakat, seperti perumahan umum, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial kesejahteraan sosial yang sesuai dengan amanat konstitusi.

5. Fungsi Kontrol Terhadap Lingkungan

Fungsi kontrol lingkungan bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada lingkungan akibat ulah serakah manusia dalam mengeksploitasi alam. Oleh karena itu, dilakukan kontrol terhadap lingkungan seperti dengan riset dan pengembangan, konservasi, tata kota, dan lain sebagainya yang bertujuan menjaga lingkungan.

6. Fungsi Hak Asasi Manusia (HAM)

Fungsi terakhir yaitu fungsi hak manusia yang memberikan jaminan demokrasi bagi warga negara, sehingga pemerintah dapat melayani dan melindungi publik dengan baik. Sebagai salah satu fungsi dari hak tersebut yaitu perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

d. Administrasi publik mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Memastikan keamanan publik dengan baik
2. Memastikan kesejahteraan publik secara merata
3. Memastikan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa memandang apapun.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kerja sama yang baik antara lembaga pemerintahan dan tentu saja warga negara atau masyarakat. Tidak dipungkiri, tujuan utama dari administrasi publik yaitu agar bisa mencapai tujuan negara sesuai dengan keinginan publik. Adapun beberapa keinginan publik tersebut seperti di bawah ini: keamanan, kesejahteraan, keadilan.

Untuk bisa mencapai tujuan administrasi publik tersebut, maka diperlukan beberapa hal seperti berikut ini:

1. Partisipasi sosial

Partisipasi sosial merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan administrasi publik agar terlaksana dengan baik

2. Tanggung jawab sosial

Tanggung jawab sosial adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaksana administrasi publik kepada masyarakat atau warga negara.

3. Dukungan sosial

Dukungan sosial ini merupakan dukungan yang diberikan oleh publik terhadap pelaksanaan administrasi publik

4. Kontrol sosial

Kontrol sosial ini yaitu kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh publik terhadap kegiatan administrasi publik yang dilakukan oleh pemerintah.

Dari sini kita paham bahwa administrasi publik bisa ikut menentukan apa saja tujuan pembangunan dan menentukan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Terlebih, yang berhubungan dengan pelayanan umum atau publik bagi semua warga negara Indonesia. Administrasi publik dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan suatu negara dan kondisinya. Dengan semakin kompleks masalah di suatu negara tersebut, maka akan muncul cara-cara baru sebagai solusi terhadap masalah tersebut juga. Itu sebabnya ilmu administrasi publik berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, manusia, dan suatu negara. Adanya contoh yang menjadi dasar dalam pengamalan kajian administrasi publik di masyarakat. Misalnya saja;

1. Keputusan dalam pemerintahan

Administrasi publik berusaha untuk menguraikan bagaimana keputusan dalam pemerintahan dibuat serta mengelola proyek pemerintah untuk melaksanakan keputusan itu. Untuk mengilustrasikan banyak keputusan yang harus ditangani oleh seorang administrator.

Sebagai contohnya misal ada peningkatan kejahatan dengan kekerasan yang mempengaruhi lingkungan tertentu. Pejabat publik harus memberikan solusi yang paling efektif dan efisien untuk mengurangi kejahatan di daerah tersebut.

Salah satu gagasan adalah dengan menambah jumlah polisi di wilayah itu, tetapi berapa banyak yang dibutuhkan? Di mana mereka seharusnya berada?. Kemungkinan lain adalah mengembangkan program sekolah untuk remaja bermasalah. Namun, dari mana dana yang akan digunakan untuk mewujudkannya? Bagaimana upaya membujuk orang dewasa dan remaja untuk berpartisipasi?

Mungkin solusinya adalah mengadvokasi peningkatan waktu penjara bagi pelanggar berulang. Namun tantangannya adalah, apakah menghukum seseorang menjadi keputusan yang lebih baik atau lebih buruk daripada mencoba merehabilitasi mereka?

Semua pertanyaan tersebut adalah contoh kecil yang harus dijawab administrator publik untuk menyelesaikan satu masalah. Ini adalah upaya yang berkelanjutan, karena pemerintah memiliki banyak masalah-mulai dari perawatan kesehatan hingga teknologi hingga keuangan-untuk dipecahkan dalam rangka menciptakan masyarakat yang lebih sempurna.

Secara lebih sederhana, berikut ini disajikan beberapa contoh administrasi publik yang ada di dalam pengertian negara kita, diantaranya yaitu:

- a. Meberikan dukungan kelembagaan terhadap pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM-MANDIRI).

- b. Adanya diagnosis SDM teknologi informasi, SK pelaku teknologi informasi dipusat pengolahan data kepegawaian.
- c. Melakukan analisis kinerja pemungutan PBB di daerah istimewa Yogyakarta.
- d. Melakukan analisis hubungan antara pelatihan, karakteristik individu dengan kinerja petugas penyuluhan lapangan pertanian di dinas pertanian dan kelautan kota medan.
- e. Melakukan peninjauan atas kebijakan PPN pada usaha mikro dan menengah (UMKM) tidak berbadan hukum untuk memperluas objek pajak.
- f. Melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2012 pada direktorat jenderal pajak Republik Indonesia Jakarta.
- g. Mengkaji kepuasan investor atau calon investor terhadap kualitas pelayanan perizinan investasi di badan koordinasi penanaman modal daerah (BKPM) provinsi Banten.

- h. Pengadaan aspek kelembagaan dalam implementasi program kali bersih (PROKASIH) pemda DKI Jakarta.
- i. Melakukan analisis pelaksanaan penanganan terhadap pelanggan menunggak pembayaran rekening listrik pada PT PLN DIVRE V Jateng dan DIY kantor PLN cabang kelaten.
- j. Melakukan analisis kualitas pelayanan penerbitan ijin DEPKES/P-IRT terhadap produksi makanan/minuman industri mikro/kecil di dinas kesehatan kabupaten Bantul.

BAB II

PARADIGMA DAN PATOLOGI

A. Paradigma Administrasi Publik (PAP)

Robert T. Golimbiewski menyatakan perkembangan paradigma administrasi publik akan dapat dimengerti dalam hubungannya dengan istilah Locus dan Focus. Locus adalah institusi atau kelembagaan tempat administrasi berada, sedangkan fokus adalah sasaran spesialisasi dari bidang studi.

Dalam jurnal *Public administration Review*, Nicholas Henry menuliskan perkembangan administrasi publik sebagai berikut:

a. Paradigma I: Dikotomi Politik-Administrasi

Tokoh yang berperan dalam paradigma ini: Frank J. Goodnow, Leonard D. White, Woodrow Wilson. Lahirnya paradigma ini sebenarnya merupakan reaksi ketidakpuasan terhadap trikonomi kekuasaan ala Trias Politica. Ketidakpuasan tersebut akhirnya mengejawantah ke dalam karya Goodnow “*Politics and Administration*” yang menyerang

habis-habisan trias politica dan menggantinya dengan dua fungsi yaitu politik dan administrasi. Fungsi politik yang melahirkan keinginan atau kebijakan negara, sedangkan fungsi administrasi yang berhubungan dan kebijakan dari politik tersebut. Sehingga biasa dikenal dengan prinsip “When Politics Ends, Administration Begins”. Penekanan dalam paradigma ini terletak pada lokusnya yaitu birokrasi pemerintahan, sedangkan fokusnya masih belum jelas.

b. Paradigma II: Prinsip-Prinsip Administrasi

Tokoh yang berperan dalam paradigma ini adalah W.F Willoughby, Henry Fayol, F.W. Taylor, Gullick dan Urwick. Willoughby mengemukakan bahwa administrasi serta pengembangan para pekerja; (3) Menyatukan metode kerja yang terbaik dengan para pekerja yang telah terpilih dan terlatih; (4) Kerjasama yang harmonis antara manajer dan pekerja. Paradigma ini juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip administrasi yang dikemukakan oleh Henry Fayol, yaitu :

Division Work, Authority And Responsibility, Discipline, Unity Of Command, Unity Of Direction, Subordination Of

c. Paradigma III: Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik

Tokoh yang berperan dalam paradigma ini adalah Herbert Simon, Morstein Mark, John Gaus. Paradigma ini lahir karena adanya kritikan yang mempertanyakan bahwa pemisahan administrasi dan politik sebagai hal yang tidak realistis dan tidak mungkin, karena teori administrasi publik juga sebagai teori politik. Locus dari paradigma ini adalah birokrasi pemerintahan, namun fokusnya masih belum jelas.

d. Paradigma IV: Administrasi Publik sebagai Manajemen

Tokoh dalam paradigma ini adalah James G. March dan Herbert Simon. Pada paradigma ini administrasi publik mendapat bantuan kembali dari ilmu manajemen dengan ditemukannya suatu konsep lama seperti konsep pengembangan/pembinaan organisasi dan perilaku. Berbagai ilmu manajemen mulai ditawarkan dalam ilmu administrasi publik seperti teknik manajemen kepemimpinan, motivasi,

komunikasi, MIS, penganggaran, auditing, pemasaran dan sebagainya, yang dalam ilmu politik dan administrasi ini merupakan sesuatu hal yang sangat baru. Perkemangan ilmu administrasi murni yan didukung oleh psikologi sosial dan perkembangan kebijakan publik. Dalam paradigma ini, ilmu administrasi lebih ditekankan pada fokusnya yaitu teori organisasi dan manajemen namn tidak pada locusnya.

e. Paradigma V: Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik

Tokoh yang berperan dalam paradigma ini adalah Felix A. Nigro dan Llyod G. Nigro. Dalam paradigma ini, ilmu administrasi publik sebagai administrasi publik dimana berbagai konsep masuk ke dalam ilmu ini. Nigro dan Nigro kemudian mengembankan perspektif “Modern Public Administration” yang menuliskan bahwa: (1) Usaha kelompok-kelompok yang kooperatif di dalam penataan publik; (2) Terdiri dari 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan hubungan antar ketiganya dalam nuansa kerja sama (tidak ada pemisahan); (3) Memainkan peranan penting

dalam perumusan kebijakan, oleh karena itu administrasi publik adalah bagian dari proses politik; (4) Administrasi public dibedakan dari organisasi privat, dimana organisasi privat lebih berorientasi pada profit; (5) Administrasi memberikan pelayanan bagi publik sehingga administrasi publik modern selalu berhubungan dengan adanya kerjasama antara ketiga cabang pemerintah, perumusan kebijakan, proses politik, dan pelayanan publik.

f. Perkembangan Paradigma Administrasi Publik

Dalam ilmu administrasi publik terdapat tiga paradigma yang hampir disepakati oleh para ahli administrasi publik seperti menurut, Denhardt & Denhardt mengungkapkan bahwa terdapat tiga perspektif atau paradigma dalam administrasi publik. Perspektif tersebut adalah old public administration, new public management, dan new public service yang dapat dikelompokkan menjadi tiga orde/masa yaitu; 1. Old Publik Administration (Birokrasi; Pra 1970), 2. New Publik Manajemen (pasca 1970), 3. New Public Service (Post 2003).

Dalam pembagian orde/masa tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut;

1. Old Public Administration (Pra 1970)

Pada era ini menganut falsafah political teori dimana politik dan administrasi merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan bagai sekeping mata uang, terdapat banyak pendukung peikiran filsafat pada era ini seperti; Confusius, Plato, Aristoteles, Niccolo Machiavelli, Montesqueiu, JJ. Rousseau, John Stuart Mill, dimana prinsip-prinsipnya adalah:

1. Pelayanan publik harus memiliki moral yang baik
2. Pihak yang memerintah dan anak buahnya harus memiliki hubungan paternalistik yang baik, dan memberi tauladan yang baik pada bawahannya.
3. Menekankan pada loyalitas bawahan yang mampu membantu penguasa
4. Pembatasan campur tangan pemerintah dalam urusan-urusan lokal dan pribadi

5. Mengutamakan prosedur birokrasi formal dalam manajemen dan pelayanan publik
6. Dikotomi antara politik dan administrasi
7. Perlunya Efisiensi dalam organisasi publik.

Hanya dalam prakteknya bisa dikatakan masih berjalan di negara-negara berkembang yang menganut paham kerajaan (Brunai Darussalam, Arab Saudi, dll) dan juga termasuk di Indonesia dimana prinsip ini berlaku pada masa penjajahan belanda, atau mungkin sampai saat ini.

2. New Publik Manajemen (Pasca 1970)

Pada Era ini menganut falsafah Economic Theory, Run Government like a business (Menjalankan Pemerintahan seperti Bisnis), atau mengelola pemerintahan dengan pendekatan bisnis dan memanfaatkan sektor private/swasta, Dengan prinsip-prinsipnya antara lain;

1. Menggunakan sektor 'private' dan pendekatan bisnis dalam sektor publik (run government like a business).
2. Penerapan prinsip "good governance".

3. Kegiatan-kegiatan yg tidak bisa dilakukan secara efisien dan efektif oleh pemerintah ditangani oleh sektor swasta.
4. Dalam sistem manajemen dilakukan sistem pelayanan sipil, yaitu manajer diperkenankan menegosiasikan kontrak mereka dengan para pekerja.
5. Fokus sistem anggaran pada kinerja dan hasil.
6. Manajemen berorientasi pada hasil (managing for result)
7. Menggagas konsep “citizens charter”.
8. Mengenalkan konsep Reinventing Government.
9. Menciptakan pemerintahan “works better & costs less”

Penerapan New Public Manajemen banyak diterapkan di negara-negara “anglo saxon” seperti Australia, Kanada, New Zealand, Inggris dan USA. Dimana di negara-negara tersebut sektor swasta memegang peranan penting dalam pengelolaan masyarakat serta merupakan partner pemerintah dalam rangka Work Better dan Cost Less, Seperti yang dilakukan di New Zealand : kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah secara efisien dan efektif oleh pemerintah, ditangani

oleh sektor swasta, di Inggris tahun 1983, dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Robert Hawke memelopori gagasan *managing for result*, dan puncaknya adalah penerapan *Good Governance* (Pemerintahan yang baik). Di Indonesia pun *Good Governance* mulai di gaungkan pasca reformasi tahun 1998 bahwa pemerintahan kita akan menjalankan *good Governance*, yang menjadi permasalahan adalah apakah sudah bisa berjalan dengan baik bangsa kita mengadopsi sistem tersebut secara utuh.

3. New Public Service (Post 2003)

Pada Era ini Falsafahnya *Democracy Theory* (Teori Demokrasi) *run goverment like a democracy* (menjalankan pemerintahan seperti Demokrasi) dengan penekanan pada *Serve Citizens, not Customer* (Melayani warga masyarakat, bukan pelanggan), *Seek the Public Interest* (mengutamakan kepentingan public), dan *Value Citizenship over Entrepreneurship* (lebih menghargai warganegara daripada kewirausahaan). Sehingga peran pemerintah dalam

menjalankan administrasi memegang prinsip-prinsip sebagai berikut;

1. Administrator Publik lebih banyak mendengar daripada berkata (More listening than telling) dan lebih banyak melayani daripada mengarahkan (More serving than steering).
2. Kerjasama melalui jaringan kerja (networking).
3. Akuntabilitas dan transparansi mengiringi tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan publik.
4. Keterlibatan masyarakat sebagai warga negara secara aktif dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik.
5. Pola pikir bahwa pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang wajib bagi Pemerintah.

perspektif new public service membawa angin perubahan dalam administrasi publik. Perubahan ini pada dasarnya menyangkut perubahan dalam cara memandang masyarakat dalam proses pemerintahan, perubahan dalam memandang apa

yang dimaksud dengan kepentingan masyarakat, perubahan dalam cara bagaimana kepentingan tersebut diselenggarakan, dan perubahan dalam bagaimana administrator publik menjalankan tugas memenuhi kepentingan publik. Perspektif ini mengedepankan posisi masyarakat sebagai warga negara dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Perspektif ini membawa upaya demokratisasi administrasi publik. Pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas utama bagi administrator publik sekaligus sebagai fasilitator bagi perumusan kepentingan publik dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Perspektif ini juga mengakui bahkan menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai jenjang pemerintahan, termasuk daerah.

B. Patologi Administrasi Birokrasi Publik

Patologi, suatu istilah yang diadopsi dari bidang ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan. Patologi menurut Suhendra (2006:41) adalah penyakit yang biasa menyerang setiap orang dari keadaan sehat menjadi sakit. Sebagai bahan pertimbangan, kita

mengutip definisi patologi sosial menurut Kartini Kartono (dalam Makmur, 2007:64), yaitu semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral hak milik, hidup rukun bertetangga disiplin kebaikan dan hukum formal serta hidup rukun.

Patologi birokrasi bisa diartikan sama dengan “penyakit birokrasi”. Peran birokrasi sebagai implementor dari kebijakan politik atau dengan kata lain birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan, maka patologi birokrasi dapat diartikan sebagai persoalan atau permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan akibat birokrasi takmampu dalam memenuhi kebutuhan publik dengan baik. Dengan demikian dapat dilihat bahwa birokrasi merupakan suatu organisasi dengan peran dan posisi tertentu dalam menjalankan administrasi pemerintah suatu negara. Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA (1988) mengatakan bahwa pentingnya patologi ialah agar diketahui berbagai jenis penyakit yang mungkin diderita oleh manusia. Analogi itulah yang berlaku pula bagi suatu birokrasi. Artinya agar seluruh birokrasi

pemerintahan negara mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul baik bersifat politik, ekonomi, sosio - kultural dan teknologikal.

Membangun sistem kontrol dan akuntabilitas publik menjadi signifikan dalam memerangi patologi birokrasi. Sebagai “eksekutor” kekuasaan birokrasi sangat mudah tergoda untuk melakukan abuse of power. Dalam penelitian Teruna (2007) dinyatakan bahwa salah satu ruang yang rentan terhadap patologi birokrasi berkenaan dengan proses pembangunan, khususnya penjabaran program ke dalam proyek-proyek pembangunan atau dikenal dengan istilah pengadaan barang dan jasa, seperti: tindakan mark up, penggelapan, manipulasi, suap, penyunatan dan sebagainya.

Selanjutnya Siagian (1994) mengelompokkan patologi birokrasi ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu:

1. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat dilingkungan birokrasi, seperti: penyalahgunaan wewenang dan jabatan; persepsi atas dasar prasangka;

mengaburkan masalah; menerima sogok; pertentangan kepentingan; cenderung mempertahankan status quo; empire building; bermewah-mewah; pilih kasih; takut pada perubahan, inovasi, dan resiko; penipuan; sikap sombong; ketidakpedulian pada kritik dan saran; tidak mau bertindak; takut mengambil keputusan; sifat menyalahkan orang lain; tidak adil; intimidasi; kurang komitmen; kurang koordinasi; kurang kreativitas; kredibilitas rendah; kurangnya visi yang imajinatif; kedengkian; nepotisme; tindakan tidak rasional; bertindak diluar wewenang; paranoid; patronase; keengganan mendelegasikan; ritualisme; keengganan pikul tanggung jawab; dan xenophobia.

2. Patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional, seperti: ketidakmampuan menjabarkan kebijaksanaan pimpinan; ketidaktelitian; rasa puas diri; bertindak tanpa berpikir; kebingungan; tindakan yang tidak produktif; tidak adanya kemampuan berkembang; mutu hasil pekerjaan yang rendah; kedangkalan; ketidakmampuan belajar;

ketidaktepatan tindakan; inkompetensi; ketidakcekan; ketidakteraturan; melakukan tindakan yang tidak relevan; sikap ragu-ragu; kurangnya imajinasi; kurangnya prakarsa; kemampuan rendah; bekerja tidak produktif; ketidakrapian; dan stagnasi.

3. Patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti: penggemukan biaya; menerima sogok; ketidakjujuran; korupsi; tindakan kriminal; penipuan; kleptokrasi; kontrak fiktif; sabotase; tata buku tidak benar; dan pencurian.
4. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif, seperti: bertindak sewenang-wenang; pura-pura sibuk; paksaan; konspirasi; sikap takut; penurunan mutu; tidak sopan; diskriminasi; dramatisasi; sulit dijangkau; sikap tidak acuh; tidak disiplin; kaku; tidak berperike-manusiaan; tidak peka; tidak sopan; tidak peduli tindak; salah tindak; semangat yang salah tempat; negativisme;

melalaikan tugas; tanggungjawab rendah; lesu darah; paparazi; melaksanakan kegiatan yang tidak relevan; utamakan kepentingan sendiri; suboptimal; imperatif wilayah kekuasaan; tidak profesional; sikap tidak wajar; melampaui wewenang; vested interest; dan pemborosan.

5. Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan, seperti: penempatan tujuan dan sasaran yang tidak tepat; kewajiban sosial sebagai beban; eksploitasi; tidak tanggap; pengangguran terselubung; motivasi yang tidak tepat; imbalan yang tidak memadai; kondisi kerja yang kurang memadai; pekerjaan tidak kompatibel; tidak adanya indikator kinerja; miskomunikasi; misinformasi; beban kerja yang terlalu berat; terlalu banyak pegawai; sistem pilih kasih; sasaran yang tidak jelas; kondisi kerja yang tidak nyaman; sarana dan prasarana yang tidak tepat; dan perubahan sikap yang mendadak.

a. Dimensi Pelayanan Publik

- 1). Responsifitas

Responsifitas merupakan faktor yang sangat penting dalam dimensi pelayanan publik. Tentunya pelayanan yang responsif dapat meningkatkan kuantitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga semakin banyak kebutuhan masyarakat yang dapat terpenuhi. masyarakat yang dapat terpenuhi. Dalam memberikan tanggapan atau respon atas kebutuhan masyarakat, perangkat kecamatan Ranowulu selalu berusaha secepat mungkin menyelesaikan persoalan yang ada, seperti hal yang dapat dilakukan hari itu juga sebisa mungkin akan diselesaikan hari itu juga karena esok harinya akan ada hal baru yang harus diselesaikan sehingga mereka dapat melayani lebih banyak masyarakat. Dengan demikian, pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat di kecamatan Ranowulu rata-rata dapat terpenuhi atau dapat terselesaikan dengan baik

2). Responsibilitas

Pertanggungjawaban atas kinerja pelayanan merupakan

hal mutlak. Sehingga setiap hal yang dilakukan oleh
Sehingga setiap hal yang dilakukan oleh pelaku birokrasi
dapat dipertanggungjawabkan dan semata-mata hanya
untuk melayani masyarakat. Pelayanan terhadap
masyarakat oleh perangkat kecamatan Ranowulu telah
berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing perangkat dan menjadi tanggungjawab dari setiap
perangkat kecamatan yang ada. Masing- masing staf
kecamatan Ranowulu sudah memiliki tugas pokok dan
fungsinya masing-masing sehingga penugasan Camat
kepada bawahannya itu sesuai dengan tupoksi masing-
masing.

3). Akuntabilitas

Setiap staf kecamatan Ranowulu memiliki tanggung
jawab masing-masing terhadap tugas yang telah
dipercayakan. terhadap tugas yang telah dipercayakan.
Meskipun demikian, ada beberapa oknum staf kecamatan
Ranowulu yang tidak bertanggungjawab atas kepercayaan

yang telah diberikan seperti contohnya hanya datang ke kantor untuk melakukan absensi lalu kembali pulang ke rumah. Menanggapi hal ini, Sekretaris Camat beberapa langkah seperti menghubungi Kasubag Kepegawaian agar TPP dari beberapa pegawai yang sering bolos kerja ini tidak ditandatangani, serta menyampaikan kepada pemerintah kelurahan agar supaya absen yang dimasukkan sesuai dengan kehadiran mereka yang ada di kelurahan masing-masing.

BAB III

HISTORI DAN PROBLEMATIKA

A. Sejarah Reformasi

Era Orde Lama yang berlangsung selama setidaknya 22 tahun ini, hampir tidak terjadinya pembangunan terkecuali pembuatan sebuah sarana olahraga yang berlokasi di Senayan yang digunakan untuk perhelatan Asian Games IV dan Ganefo atau yang merupakan singkatan dari game of the new emerging forces merupakan sebuah pesta olahraga yang dibuat dan digagaskan oleh Presiden Soekarno yang memiliki tujuan menyaingi Olimpiade. Serta dalam era Orde Lama ini dibangun pula Bendungan Jatiluhur, Pabrik Baja Krakatau Steel. Namun, untuk penyelesaian ketiga sarana ini baru terjadi di era Orde Baru. Dalam era ini juga kita bisa melihat adanya pembangunan Masjid Istiqlal serta Monas atau singkatan dari Monumen Nasional yang merupakan sebuah monumen peringatan kemerdekaan Indonesia.

Pada tahun 1960 sendiri, adanya rencana pemerintah untuk Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun,

namun rencana tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan negara Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk berperang melawan Belanda dalam rangka merebut kembali Irian Barat. Selain itu, adanya iklim politik yang tidak kondusif juga menjadi salah satu penyebabnya. Selama era Orde Lama yang berlangsung 22 tahun ini yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dimana adanya sistem presidensial yang berlaku hanya delapan tahun, di tahun 1945 hingga tahun 1949 terjadinya peperangan dalam menjaga kemerdekaan, segala daya serta upaya yang dilakukan bangsa Indonesia saat itu untuk mempertahankan kemerdekaannya dan berperang melawan agresi militer negara Belanda yang saat itu ingin menjajah Indonesia lagi.

Pada periode itu juga, terjadi dua kali pemberontakan yang terdiri dari pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Muso di Madiun pada September 1948 dan pemberontakan kedua yang dilakukan oleh Negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo pada Agustus 1949.

1. Berbagai Pemberontakan

Dalam periode tahun 1950 hingga tahun 1959, adanya penggunaan UUD Republik Indonesia Serikat serta UUDS 1950 yang memiliki nilai dan menganut sistem parlementer di mana kekuasaan eksekutif atau pemerintahan ada pada tangan perdana menteri. Dalam periode tahun ini terjadi beberapa pemberontakan, yaitu pemberontakan Andi Azis pada tahun 1950, pemberontakan Kahar Muzakar pada tahun 1962, pemberontakan PRRI serta pemberontakan Permesta pada tahun 1958. Akibat terjadinya berbagai pemberontakan tersebut memberikan dampak negatif pada jalannya pemerintahan yang ada, dimana kabinet terus menerus jatuh bangun selama periode sembilan tahun tersebut.

Hal ini dikarenakan dalam periode tersebut terjadi pergantian perdana menteri sebanyak delapan kali dan ada pula kabinet yang memiliki usia jabatan hanya tiga bulan. Dengan situasi politik pada saat itu dan keamanan

bangsa Indonesia yang terancam, hampir tidak ada pembangunan yang terjadi sehingga yang membuat kesejahteraan masyarakat diabaikan.

2. Perang dengan Belanda dan Malaysia

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden saat itu yaitu Soekarno mengeluarkan dekrit kembali dan mengumumkan bahwa pemerintahan akan kembali ke UUD 1945. Dengan adanya pemberlakuan UUD 1945 kembali maka sistem presidensial juga kembali. Dimana presiden yang menjadi kepala pemerintahan di sebuah negara. Setelah kekuasaan eksekutif yang tadinya ada pada perdana menteri berpindah kembali ke tangan Presiden Soekarno, masalah Irian Barat yang seharusnya sudah dirundingkan satu tahun setelah adanya perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB namun tidak dilaksanakan, dituntut untuk segera dijalankan kembali oleh Presiden Soekarno.

Karena dari pihak Belanda yang tetap menolak untuk merundingkan masalah mengenai Irian Barat ini, maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain untuk mengambil kembali Irian Barat dari tangan pihak Belanda menggunakan kekuatan militer yaitu perang.

Dalam mempersiapkan perang tersebut, Indonesia membeli alat utama sistem persenjataan atau alutsista secara besar-besaran dengan cara mengutang kepada negara Rusia. Dengan melakukan hal tersebut, Indonesia pada saat tersebut memiliki persenjataan yang terkuat di dunia khususnya pada bagian selatan khatulistiwa.

Presiden Soekarno pada saat itu memilih panglima untuk memimpin jalannya perang dengan pihak Belanda yaitu pemimpin palagan Serangan Umum 1 Maret Letnan Kolonel Soeharto. Pemilihannya tersebut dikarenakan Presiden Soekarno sudah mengenal Soeharto sejak pemerintahan Indonesia mengungsi ke Yogyakarta.

Di Maret 1962, Soeharto yang sudah menyandang pangkat Mayor Jenderal tersebut ditunjuk untuk menjadi Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat. Setelah mempersiapkan diri untuk menghadapi perang melawan pihak Belanda dengan alutsista dalam skala besar untuk merebut kembali Irian Barat, pada akhirnya masalah yang ada terselesaikan melalui jalur perundingan di PBB. Setelah selesainya urusan membebaskan Irian Jaya tersebut, Indonesia kembali untuk mempersiapkan diri untuk memulai perang melawan Malaysia yang disebut sebagai negara boneka yang dibuat oleh bangsa Inggris.

3. Tujuh Kali Usaha Membunuh Presiden

tujuh kali. Hal tersebut menjadi sebuah gambaran bagaimana situasi saat itu dimana keamanan Selama masa jabatannya, Presiden Soekarno sudah mengalami percobaan pembunuhan setidaknya sebanyak tidak terjaga dan suasana tidak kondusif.

Usaha pembunuhan yang pertama terjadi dengan adanya kejadian penggranatan di Perguruan Cikini. Tepatnya pada tanggal 30 November 1957, yang merupakan ulang tahun ke lima belas dari Perguruan Cikini dan dihadiri Presiden Soekarno sebagai wali murid dari Megawati. Namun, secara tiba-tiba beberapa granat meledak di tengah penyambutan presiden, akibat insiden ini ada tiga orang tewas yang termasuk ke dalamnya yaitu pengawal presiden.

Usaha pembunuhan yang kedua terjadi pada tanggal 9 Maret 1960, dimana terjadinya ledakan yang berasal dari hasil tembakan cannon 23 mm pesawat Mig-17 yang dipiloti oleh Daniel Maukar ditembakkan ke istana. Tembakan tersebut kemudian mengenai pilar yang membuatnya jatuh tidak jauh dari meja kerja Presiden Soekarno saat itu. Namun, untungnya presiden pada saat itu sedang tidak berada di dekat mejanya.

Usaha pembunuhan yang ketiga terjadi pada bulan April 1960, pada saat itu Presiden Soekarno sedang melakukan perjalanan ke Bandung. Ketika mobil yang ditumpangi Presiden melewati jembatan Rajamandala, tiba-tiba sekelompok anggota DI/TII menghadang jalannya mobil dan melemparkan granat, namun untungnya granat tersebut tidak mengenai presiden.

Usaha pembunuhan yang keempat dan kelima terjadi di tempat yang sama dimana Presiden Soekarno berusaha dibunuh saat berada di Makassar. Yang pertama terjadi tepatnya di jalan Cendrawasih melalui pelemparan granat, dan yang kedua terjadinya penembakan menggunakan mortir pada tahun 1960. Peristiwa yang terjadi ini dikenal dengan Peristiwa Mandai.

Usaha pembunuhan yang keenam, merupakan usaha pembunuhan dengan cara menembak yang dilakukan oleh anggota DI/TII bernama Bachrum. Kejadian ini terjadi di halaman istana, Bachrum yang

berada di shaf depan ketika sedang berjamaah shalat Idul Adha di Masjid Baiturrahman. Hal ini terjadi ketika Bachrum melibat Presiden Soekarno, dan langsung mengambil pistol yang ada dibalik jasanya dan mencoba menembakkannya ke arah presiden yang saat itu berjarak kurang dari lima meter. Namun untungnya, arah peluru tersebut melenceng dan mengenai Ketua DPR GR KH Zainul Arifin, sehingga Presiden Soekarno bisa selamat.

Usaha pembunuhan yang ketujuh terjadi pada Desember 1964, dimana ketika Presiden Soekarno sedang berada dalam perjalanan dari Bogor menuju Jakarta. Ketika beliau berada di Cimanggis, tiba-tiba sebuah granat dilempar oleh seorang laki-laki ke mobil presiden. Namun untungnya, jarak antara titik melempar berada diluar jangkauan laju mobil sehingga Presiden Soekarno dapat selamat.

a. Era Orde Baru

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Awal dari masa pemerintahan di era Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya surat perintah yang berlaku selama kurang lebih 32 tahun pada 11 Maret 1966 hingga 1988. Diangkatnya Soeharto menjadi Presiden Indonesia juga menandakan era Orde Baru menggantikan Presiden Soekarno sebelumnya. Penamaan Orde Baru ini digunakan sebagai perbandingan dengan masa sebelumnya, yaitu Orde Lama. Di masa orde baru ini, sistem pemerintahannya masih menggunakan presidensial dimana keputusan eksekutif ada ditangan presiden serta memiliki bentuk pemerintah yaitu republik. Dasar konstitusi dari negara Indonesia adalah UUD 1945.

Berdasarkan *Encyclopaedia Britannica* (2015), pada masa Orde Baru ini pemerintah menekankan pada adanya stabilitas nasional baik dalam program politiknya dan juga

rehabilitas ekonomi yang ada, serta berkepribadian dan juga fokus pada bidang sosial budaya.

Pada masa ini juga terjadi kemajuan dalam demokrasi di Indonesia. Dimana seperti yang dapat dilihat dari hasilnya, inflasi menurun dan mata uang Indonesia menjadi lebih stabil. Namun, walaupun mengalami perkembangan tersebut, kekuasaan dari seluruh pemerintahan pada saat itu ada di tangan presiden seutuhnya. Hal itu yang menyebabkan runtuhnya era Orde Baru dikarenakan adanya krisis moneter di tahun 1997.

Setelah adanya krisis tersebut, kondisi ekonomi negara Indonesia semakin memburuk, dan hal ini bukan hanya dialami Indonesia saja namun juga berbagai negara lain. Kondisi yang terjadi pada saat itu membuat korupsi, kolusi, serta nepotisme atau KKN menjadi semakin tinggi dan angka kemiskinan juga meningkat.

Adanya ketimpangan yang mencolok antara kedua pihak tersebut, memicunya gerakan demokrasi dalam rangka

menuntut adanya perbaikan ekonomi dan juga reformasi total pada pemerintahan Indonesia. Era Orde Baru yang ada berakhir pada tahun 1998 dengan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden yang membuat kemunculan era reformasi.

a. Ciri-ciri Pemerintahan pada Orde Baru

1. Kuatnya Pengaruh Militer atau Dwifungsi ABRI

Ciri yang pertama dari pemerintahan pada Orde Baru adalah kuatnya pengaruh militer dan ABRI. Hal ini memang sudah terlihat sejak Orde Lama, dimana dalam kabinet Dwikora berisikan dari banyak perwira tinggi Angkatan Darat. Namun, pada Orde Baru terjadi perubahan dimana fungsi ABRI dalam tingkat sipil menjadi lebih kuat lagi. Partai Golongan Karya yang merupakan mesin politik utama dari pemerintah Orde Baru berisikan banyak anggota militer.

ABRI yang ada juga memiliki kegiatan sipil yang terdiri dari ABRI Masuk Desa, dan juga menduduki jabatan sipil serta militer disaat yang bersamaan. Selain

itu, banyak anggota ABRI yang menjadi komisaris berbagai perusahaan besar di Indonesia, yang menjadi salah satu tanda adanya KKN di dalam pemerintahan Orde Baru.

b. Era Reformasi

Awal dari pemerintahan di era reformasi atau yang disebut sebagai masa transisi ini digunakan untuk membuka peluang dalam menata kehidupan yang lebih berdemokrasi. Masa reformasi dimulai dengan adanya kepemimpinan BJ Habibie sebagai presiden untuk menggantikan Soeharto yang telah mengundurkan diri.

Reformasi yang ada di Indonesia sendiri terjadi pada tahun 1998, dimana merupakan awal kejatuhan Orde Baru setelah adanya gerakan reformasi dari berbagai elemen masyarakat. Reformasi yang terjadi tersebut disebabkan semakin banyaknya krisis yang terjadi seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, dan juga krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada.

Hal ini dikarenakan, setiap kegiatan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada saat itu tidak diimbangi dengan adanya pembentukan mental para pelaksana pemerintahnya yang membuat banyak terjadinya penyelewengan, penyimpangan, pemerintahan yang otoriter, dan juga yang terbesar KKN. Pada masa reformasi ini, Presiden Habibie membuat reformasi berskala besar pada sistem pemerintahan yang ada. Sistem tersebut dijalankan dengan adanya keterbukaan dan nilai demokrasi yang lebih ditonjolkan.

Pada masa ini juga, partai politik independen yang ada tidak lagi dipengaruhi oleh kekuasaan birokrat militer. Di era reformasi ini juga adanya pemberdayaan bagi masyarakat sipil dengan penyampaian informasi yang dilakukan secara transparan. Hal ini ditandai dengan adanya pemilu atau proses pemilihan secara langsung untuk presiden dan wakil presiden, kepala daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pemilihan umum

tersebut pertama kali dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004. Demokrasi yang ada pada saat itu kemudian berkembang dengan adanya kesadaran masyarakat dalam kehidupan perpolitikan nasional.

b. Tujuan Reformasi

Tujuan reformasi dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsaan bernegara.
2. Menata kembali seluruh struktur kenegaraan, termasuk perundangan dan konstitusi yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh masyarakat bangsa
3. Melakukan perbaikan di segenap bidang kehidupan baik politik, ekonomim sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.
4. Mengapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat bangsa yang tidak

sesuai lagi dengan tuntutan reformasi, seperti KKN, kekuasaan sewenang-wenang/otoriter, penyimpangan dan penyelewengan yang lain dan sebagainya.

c. Syarat-syarat Reformasi

Adapun ketentuan atau syarat-syarat yang bisa menyatakan suatu kondisi reformasi adalah sebagai berikut;

1. Telah terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan kehidupan di bidang ketatanegaraan, termasuk bidang perundang-undangan dan hukum.
2. Penyelenggara Negara telah menggunakan kewenangannya secara semena-mena/otoriter di luar etika kenegaraan melalui tindakan-tindakan yang merugikan dan menekan kehidupan rakyat keseluruhan.
3. Telah semakin melemahnya kondisi kehidupan ekonomi seluruh warga masyarakat bangsa sebagai

akibat krisis multidimensi yang berkepanjangan dan terus-menerus.

4. Perlunya langkah-langkah penyelamatan dalam segenap bidang kehidupan, khususnya yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak.
5. Reformasi harus menggunakan landasan kerohanian berupa falsafah dasar Negara Indonesia

d. Dampak reformasi

1. Dampak Negatif

Agenda reformasi telah ditetapkan melalui berbagai ketetapan MPR dan berbagai produk perundang-undangan yang baru, tetapi setelah berlangsung lebih dari 10 tahun lamanya, terasa bahwa reformasi berjalan secara belum terarah. Bila dinilai kembali kepada kondisi sebelum reformasi maka tampak bahwa kekuasaan yang pada waktu dulu bersifat orotiter, sekarang harus bersifat demoratis, pemerintahan yang

terpusat harus menjadi desentralisasi. Pemerintahan yang bersifat tertutup dan penuh larangan serta pengawasan seharusnya lebih terbuka, transparan, serta kebebasan. Rasionalitas dan objektivitas telah tersisihkan sehingga muncul egoism, perseorangan maupun kelompok tanpa mengidahan etika, moral, norma, dan hukum yang ada. Politik kekerasan banyak bermunculan dan berkembang mewarnai kehidupan baru dalam masyarakat sehingga sulit mengatasi maupun kehidupan bermasyarakat bangsa dan bernegara. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini harus segera diatasi dan dihapuskan.

2. Dampak positif

Dampak positif reformasi dapat kita rasakan dan kita saksikan melalui berita-berita media massa, serta surat kabar dan internet maupun pendapat-pendapat pengamat bidangnya. Munculnya suasana baru yang bisa kita saksikan diantaranya terdapatnya kebebasan

pers, kebebasan akademis, kebebasan berorganisasi dan lain-lain yang selama ini belum pernah ada, termasuk kebebasan pemikiran dalam memperjuangkan pembebasan tahanan politik maupun narapidana politik, hal ini bisa dinilai sebagai lambang dari suatu kebebasan berpolitik di Indonesia.

3. Hasil Reformasi

Reformasi memang bukan hal yang mudah dalam pencapaiannya tetapi juga cukup banyak makan waktu. Berbagai macam paradox kita hadapi dan saksikan bersama. Banyak sorotan tajam dari masyarakat luas dewasa ini, yaitu penegakan hukum, pencegahan maupun penindakan terhadap KKN lama maupun yang muncul semasa reformasi karena hal tersebut menyangkut dan berkaitan dengan ketertiban keamanan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap para investor asing yang diharapkan ditangani secara serius oleh para pelaksana reformasi, khususnya para

penguasa yang kompeten. Disamping itu, sangat didambakan lahirnya good governance yang mampu menangani segenap permasalahan krisis yang belum usai. Hal ini juga akan dibantu oleh seluruh public melalui organisasi kemasyarakatan dan organisasi non pemerintah yang pada dewasa ini belum banyak menyadari keberadaan ruang public yang diperuntukan bagi mereka dalam beraksi dan berkarya ikut membangun dan memperluas kemampuan good governance tersebut.

4. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi

Sebagai suatu paradig, Pancasila merupakan model atau pola berpikir yang mencoba memberikan penjelasan atas kompleksitas realitas sebagai manusia personal dan komunal dalam bentuk bangsa. Yang menjadi paradig justru sila-silanya karena sila-sila tersebut mengandung sejumlah nilai yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Pancasila sebagai

paradigm juga berada pada posisi pembangunan nasional yang meliputi segenap bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, juga di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta hukum dan hak asasi manusia, disamping yang lain. Di bidang politik, Pancasila menjadi kerangka acuan, kerangka proses, tandan kerangka arah tujuan dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan dalam rangka melakukan pembangunan politik. Pancasila juga melakukan pemikiran, gagasan, konsep, evaluasi, serta tindak lanjut bagi bidang politik kenegaraan. Pancasila juga merupakan landasan dan dasar Negara, dengan dijiwai oleh nilai kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (politik demokrasi). Dalam bidang pembangunan

nasional bidang ekonomi, pemerintah harus mengarah lebih memperhatikan kepentingan rakyat, karena sifat.

e. Delapan Area Perubahan Reformasi



Manajemen Perubahan



Deregulasi Kebijakan



Penataan Organisasi



Penataan Tatalaksana



Penataan SDM Aparatur



Penguatan Akuntabilitas



Penguatan Pengawasan



Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Manajemen Perubahan

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai Inspektorat Jenderal dalam melakukan reformasi birokrasi;
- b. terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja Inspektorat Jenderal;
- c. menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal;
- b. meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan Inspektorat Jenderal.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal Inspektorat Jenderal.
- b. meningkatnya kapasitas Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

4. Penataan Tatalaksana

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

- b. meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- c. meningkatnya kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- c. meningkatnya disiplin SDM aparatur di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- e. meningkatnya profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

6. Penguatan Pengawasan

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Inspektorat Jenderal dan Kementerian Perhubungan;
- b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Inspektorat Jenderal dan Kementerian Perhubungan;
- c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara Kementerian Perhubungan;
- d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di lingkungan Inspektorat Jenderal dan Kementerian Perhubungan.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. meningkatnya kinerja Inspektorat Jenderal; dan
- b. meningkatnya akuntabilitas Inspektorat Jenderal.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal.

AREA PERUBAHAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	LEADING SECTOR
Manajemen Perubahan	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi	Biro KIP
Penataan Peraturan Perundang-undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif	Biro Hukum
Penataan dan Penguatan Organisasi Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Biro Kepegawaian dan Organisasi
Penataan Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip <i>good governance</i>	Pustikomhub dan Biro Kepegawaian dan Organisasi
Penataan Sistem Manajemen SDM	SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera	Biro Kepegawaian dan Sekretariat BPSDMP
Penguatan Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi	Biro Perencanaan
Penguatan Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN	Sekretariat Inspektorat Jenderal
Peningkatan Kualitas Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan

B. Masalah Administrasi Publik di Indonesia

Bagaimana kasus permasalahan terkait yang pernah terjadi di Indonesia? Administrasi Publik atau bahasa Inggrisnya public administration merupakan suatu bidang keilmuan dari ilmu sosial yang membahas 3 elemen penting dalam berkehidupan bernegara yaitu bagian eksekutif, yudikatif dan legislatif. Atau bisa disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengelola suatu lembaga publik atau yang melayani kepentingan umum, seperti pemerintahan, dinas, perusahaan BUMN dan sebagainya.

Banyak sekali pengertian dari administrasi publik yang diutarakan oleh tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya. Namun kali ini kita tidak akan fokus untuk membahas definisinya namun lebih kepada untuk memberikan beberapa jenis contoh permasalahan terkait pelayanan publik yang sering terjadi di negara kita beserta dengan solusi untuk mengatasinya.

Layanan publik dilakukan oleh manusia, dan seperti halnya sifat dasar manusia yang tidak sempurna, pasti terdapat suatu

problematika dalam melayani kepentingan masyarakat umum, baik itu yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Apabila sobat kosngosan belum mengetahui apa fungsi dari penerapan Administrasi Publik dalam suatu negara, bisa dikategorikan menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Fungsi Tradisional
2. Fungsi Pembangunan Bangsa
3. Fungsi Manajemen Ekonomi
4. Fungsi Kesejahteraan Sosial
5. Fungsi Kontrol Lingkungan
6. Fungsi Hak Asasi Manusia

Apakah ada persamaan dan perbedaan antara administrasi publik dengan ilmu politik? Tentu saja ada. Ilmu politik lebih kepada pembelajaran terkait strategi mengenai cara merebut dan mempertahankan kekuasaan, sementara pelayanan publik itu fokus kepada kepuasan masyarakat terhadap kinerja dari public service tersebut

Walaupun terdapat perbedaan mengenai tujuan dan objek utamanya, namun keduanya saling berkaitan karena objek materialnya adalah negara itu sendiri. Terdapat berbagai contoh masalah pelayanan publik di Indonesia antara tahun 2017 hingga sekarang tahun 2020. Dan kongsongan akan mencoba memberikan beberapa studi kasusnya dibawah ini

a. Contoh Kasus Pelayanan Publik

1. Buruknya Fasilitas Pelayanan Publik

Saat ini kita pasti setuju bahwa yang namanya fasilitas pelayanan publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kita mungkin bisa menemui fasilitas layanan publik yang memadai di kota-kota besar, namun bagaimana di daerah marginal yang ada di Indonesia?

Selain akses masuk yang terbatas, minimnya sumber daya manusia yang mendukung dan juga tidak adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat menjadikan layanan publik sepertinya tidak berjalan secara baik. Diperlukan kerjasama

berbagai pihak antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta masyarakat untuk meningkatkan fasilitas tersebut

3. Minimnya Akses Layanan Publik untuk Kaum Marjinal

Sudah menjadi rahasia umum bahwa layanan publik sama seperti hukum yang menyenangkan pihak berduit, dan cenderung untuk melupakan keberadaan Kaum marginal atau terpinggirkan. Perbedaan perlakuan ini kerap kali terjadi dalam layanan publik.

Seperti contoh apabila pejabat pasti lebih mudah untuk mengurus surat izin, sementara orang miskin yang ingin mengurus surat yang sama harus dipersulit atau diminta untuk menunggu yang tidak pasti. Ini harus di hilangkan dengan melakukan inspeksi mendadak dan memperbaiki kualitas karakter dari aparat pelayanan publik

4. Buruknya Pengadaan Pelayanan Publik

Hasil suatu penelitian mengenai kinerja transportasi umum di Indonesia tahun ini menunjukkan salah satunya di Kota Jakarta dan kota Surabaya telah diteliti sebagai tempat

yang punya layanan angkutan umum terburuk, dimana pelayanan publik ini menjadikan hal yang krusial. Di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia, terhitung kecelakaan yang terjadi akibat perilaku supir angkutan umum yang ugal-ugalan dan menyebabkan penumpang kehilangan nyawanya secara tragis

5. Mekanisme Pengaduan Tidak Jelas

Layanan publik yang terkait dengan pengaduan saat ini masih banyak yang mengandalkan cara konvensional seperti masyarakat langsung ke kantor dan mengadakan perihal yang ingin diajukan. Kurangnya pemanfaatan teknologi untuk pengajuan secara online menjadikan masyarakat malas untuk berpartisipasi. Selain itu mekanisme pengaduannya juga tidak jelas, bisa berbeda satu sama lain antara petugas A dengan petugas B. Atau pergantian Kepala, beda pula mekanisme pengaduannya. Ini menjadikan sobat kosngosan juga bingung ketika mengurus sesuatu. Jadi ini menjadi tugas yang harus dibenahi bersama

6. Maraknya Aksi Pungli

Jasa Pungutan Liar atau "Main Belakang" inilah yang kita maksud sebagai proses pungli. Biasanya cara cepat ini membutuhkan biaya yang tinggi. Dalam hal ini yang menjadi korban adalah masyarakat yang tidak memiliki uang atau masyarakat miskin.

7. Kurangnya Kepastian

Dalam memberikan public service juga, banyak instansi pemerintahan di Indonesia yang biasanya tidak memberikan kepastian, baik itu dari aspek waktu serta besaran biaya yang dibutuhkan.

Hal ini terbukti, contohnya saat sobat kosngosan mengurus KTP elektronik, banyak yang mengalami ketidakpastian kapan jadinya kartu identitas tersebut. Sehingga membuat orang menunggu-nunggu

8. Diskriminasi Pemberian Layanan

Banyak masyarakat kita telah menjadi korban dari adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan dalam pelayanan

publik yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Bentuk diskriminasi ini dapat menyangkut kepada sesuatu yang berhubungan dengan kekerabatan, pertemanan, keluarga, etnis, status sosial dan lainnya. Misalnya A yang mendapatkan SIM C nya lebih cepat tanpa proses ujian SIM, seperti biasanya

9. Petugas yang Semena Mena

Banyak sekali mimin kosngosan temui para petugas front end atau yang berhubungan dengan layanan masyarakat secara langsung itu bersikap tidak ramah dan cenderung untuk semena-mena. Apalagi saat kita mengurus administrasi penduduk yang notabene petugas tersebut berstatus sebagai aparat sipil negara. Tentunya ini menjadi tugas kita bersama untuk memperbaiki karakter dan akhlak dari petugas pelayanan publik. Mereka harus tahu bahwa gaji yang didapatkan berasal dari pajak warga negara, sehingga mereka harus memberikan pelayanan maksimal dan ramah

10. Minimnya Transparansi

Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak kasus korupsi terbesar seringkali terjadi di bagian lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan banyak proyek yang bisa dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga adanya transparansi atau keterbukaan anggaran sangat dibutuhkan untuk menciptakan layanan publik yang berintegritas dan terbebas dari praktek korupsi kolusi dan nepotisme.

11. Kurangnya Sosialisasi

Saat layanan publik mengeluarkan suatu produk baru, mereka cenderung untuk tidak melakukan sosialisasi secara maksimal. Ini menyebabkan masyarakat kita tidak mengetahui dan kurang memanfaatkan produk tersebut. Oleh karena itu ada baiknya aparat kosngosan yang berperan sebagai aparat layanan publik memanfaatkan media Teknologi Informasi seperti media sosial, media massa,

portal website dan sebagainya untuk melakukan sosialisasi terkait layanan publik yang mereka sediakan

b. Urgensi Reformasi Birokrasi

Kondisi birokrasi di Tanah Air selama ini dianggap masih banyak kekurangan. Masalah yang kerap muncul membuat birokrasi dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan. Muncullah harapan, sudah saatnya pemerintah menata kembali politik birokrasi yang bergerak pada upaya-upaya reformatif dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang mampu menyejahterakan masyarakat.

Paras Kusut Birokrasi

Birokrasi merupakan suatu fenomena yang senantiasa hangat diperbincangkan sepanjang sejarah kehidupan manusia dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan yang selalu berhadapan dengan kekuasaan. Jelas terpatrit keyakinan bahwa birokrasi yang baik akan mampu mengantar bangsa menuju terwujudnya pemerintahan yang baik

Max Weber dalam kajiannya tentang birokrasi secara akademisdalambukunya *The Theory of Social and Economic Organization* (1922) telah melahirkan pemikiran yang dikenal dengan tipe ideal birokrasi (*ideal type*), yaitu dengan menitikberatkan pada aspek rasionalitas, impersonal, dan efisiensi dalam meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan.

Perkembangan birokrasi semakin maju mengikuti tren perkembangan zaman. Namun, persepsi masyarakat terhadap birokrasi sering kali kurang simpatik dan berkonotasi jelek. Apa pasal? Rasanya diakui atau tidak, perilaku birokrasi dewasa ini dipandang kurang berpihak pada masyarakat. Di era Reformasi, masih saja mengedepan fakta seolah politik menjadi panglima, bahkan kerap mengalahkan kekuatan birokrasi.

Birokrasi lalu mendapatkan tantangan berat dalam menampilkan model birokrasi yang ideal. Terjadinya politisasi birokrasi akan menyebabkan tidak netralnya birokrasi dalam pemerintahan. Ada beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai tantangan birokrasi saat ini. Pertama, rendahnya

pengetahuan dan keterampilan aparat birokrasi. Kedua, kebangkrutan birokrasi. Ketiga, perilaku dan gaya birokrasi yang jauh dari jati diri masyarakatnya.

Desentralisasi atau otonomi daerah sebenarnya merupakan solusi yang sangat tepat. Terjadi pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah. Hanya saja, kadang ditanggapi berlebihan oleh pemda setempat. Sejak otonomi daerah digulirkan, faktanya kerap terjadi penempatan seseorang pegawai pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya semakin langka ditemukan. Bahkan yang terjadi pada posisi seseorang pejabat sangat tergantung pada selera penguasa daerah tanpa mempertimbangkan sistem dan mekanisme yang telah ada.

Menuju Perubahan

Reformasi birokrasi yang paling substansial adalah menata kembali sistem kelembagaan dan perilaku birokrasi sebagai sumber SDM yang berkualitas dengan memberi strong point dalam bentuk kearifan dan diregulasi sebagai acuan dalam memberi warna perilaku birokrasi. Menata birokrasi berarti

mengubah paradigma. Dalam hal ini, demi menciptakan strategi reformasi birokrasi harus meliputi lima hal, yaitu struktur, proses, pengembangan sumber daya manusia, pembuatan kontrak sosial baru, dan penegakan aturan.

Semua itu membutuhkan kemauan politik yang kuat dan dijabarkan dalam sebuah grand strategy yang komplet. Agenda strategisnya bisa dijelaskan di antaranya, pertama, masalah struktur. Persoalan seperti job analysis dan restrukturisasi harus diselesaikan. Kedua, konsentrasi pada SDM yang terkait dengan skill dan distribusi. Ketiga, penekanan pada reengineering proses pelayanan masyarakat, misalnya dengan aplikasi teknologi informasi one stop services.

Keempat, menciptakan pemerintah yang berorientasi pada masyarakat dengan membuat new contractsocial. Kelima, fokus pada pendekatan hukum. Kalau semua sudah dilakukan, baru benar-benar konsentrasi pada legal enforcement. Yang tidak kalah penting adalah harus ada jembatan pengawasan dan pembinaan. Untuk mendukung itu, perlu ada pendukung yang

niscaya dipersiapkan, yaitu rancangan undang-undang mengenai administrasi pemerintahan.

Undang-undang ini merupakan hukum materiil yang menjadi payung hukum yang berlaku untuk semua sektor. Kita sudah mempunyai hukum formal bahwa putusan bisa digugat lewat PTUN. Karena itu, apabila Undang-Undang Administrasi Pemerintahan segera terselesaikan, hal ini akan sangat membantu untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan (clean government).

Yang mesti dilakukan pula adalah mewujudkan birokrasi yang ramping dan distribusi merata. Dan ini sangat terkait dengan kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, yang juga mendesak dilakukan sekarang adalah pengaturan kewenangan pusat dan daerah. Pemerintah pusat harus berani, misalnya dengan menyatakan perimbangan keuangan dikurangi jika mereka di daerah tidak ikut kebijakan pemerintah. Lalu dari mana memulainya? Memulai reformasi birokrasi bisa dilakukan dari daerah seiring dengan tuntutan otonomi daerah.

Reformasi birokrasi tidak akan terjadi bilamana daerah tidak bergerak. Sejauh ini, kita berharap pada succes story, keberhasilan suatu daerah direplikasi di daerah lain. Masalahnya, selama masa reformasi, timbul rezim yang berbedabeda di daerah. Tak pelak, reformasi birokrasi merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, ramping, tapi kaya fungsi. Untuk itu, diperlukan kearifan masyarakat, pemda, dan unsur birokrasi.

Yang penting pula adalah kejujuran. Birokrasi Indonesia dipandang sebagai sesuatu yang berat, lambat, tidak kreatif, dan kurang sensitif terhadap publik. Hal inilah penyebab terjadinya krisis yang luas di Indonesia. Nah, pembangunan ke depan harus diletakkan dalam bingkai penguatan politik birokrasi yang terarah pada reformasi birokrasi. Birokrasi harus dibangun dalam konteks pembangunan, sebab birokrasi harus bisa menjadi instrumen pembangunan yang andal.

DAFTAR PUSTAKA

- A yanti. 2010. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemimpinan Yang Baik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Caiden Gerald E. 1990. *Administrative reform comes of age*, Newyork: Walter de Gruyter.
- Caiden, G.E.1991, *Administrative Reform Comes Age*, New York, N.Y., de Gruyter.
- Caiden, Gerald E. 1968. *Prospects-for Administrative Relo'rm in Israel*, Public Administration.
- Chaizi Nasucha, 2004, *Reformasi Administrasi Publik, Teori dan Praktik*, PT Grasindo, Jakarta.
- Dror, Y. 1971. *Strategies for Administrative Reform, Development and Change*, The Hague, Netherland.
- Dwiyanto Agus,2002, *Reformasi Birokrasi Publik Cet.1*; Yogyakarta: Galang. Printika Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*.

Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.

Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press. 2005.

H.Makmur, M.si Prof. 2011. *Patologi Serta Terapinya dalam Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Jakarta: PT Gramedia.

Lee, Hahn Been, 1971. *Bureaucratic Model and Administrative Reform, Development and Change*, The Hague, Netherland.

Miftah Thoha, 2008, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Kencana, Jakarta.

Miftah Thoha.2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Penerbit Raja Grafindo. Jakarta.

Muhammad, Fadel. 2008. *Reinventing Local Government: Pengalaman dari Daerah*. Jakarta: Elekmedia Komputindo.

Neo, Boon Siong & Geraldine Chen. 2007. *Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

Pramusinto, Agus dan A.P, Erwan. 2009. *reformasi birokrasi, kepemimpinan dan pelayanan publik: kajian tentang*

pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Yogyakarta: Gaya Media.

Prof. Dr. Sondang P Siagian. 1994. *Patologi Birokrasi. Analisis, Identifikasinya dan terapinya.* Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.

Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik.* Jakarta : PT Rineka Cipta.

Tjokroamidjojo, Bintoro. *Pengantar Administrasi Pembangunan.* LP3ES. Jakarta.

Zauhar, Soesilo, 1996. *Reformasi Administrasi :Konsep, Dimensi dan Strategi.* BumiAksasra Jakarta.